

Post Media Literacy ; **Menyaksikan Kuasa Media Bersama** **Michel Foucault**

Oleh: Iswandi Syahputra¹

Abstract

This article would like to present Michel Foucault's idea concerning Knowledge and Power in media industry. As a contemporary intellectual, Foucault's thought has a unique style of postmodernism. His thought had gone beyond traditional critical theory whose trying to disclose the relation of power and economic behind the ideology of media. Foucault's thought had given new perspective in understanding how the media produce truth under tightly control process into something that seems normal. With the assumption of media has the power to create mass culture, which has to be studied critically by media literacy approach, Foucault's thought had given new space of discursive. An alternative thought on how to estimate the work of mass media as supervisor of truth and creator of information trough normalization practice.

Key Words : *media, power, truthness, knoledge.*

Pendahuluan

Artikel ini disusun berdasarkan dua pemikiran pokok, yaitu ***pertama***, industri televisi yang sering disebut-sebut sebagai industri kreatif cenderung bergerak sebagai mesin raksasa pembentuk budaya massa yang berselera rendah (*kitsch*), bahkan dapat bertindak sebagai mesin cepat pencetak 'kebenaran'. Dominan tayangan televisi dapat dikategorikan sebagai *kitsch* atau seni budaya hasil cipta media. Istilah *kitsch* berakar dari bahasa Jerman *verkitschen* (membuat murah) dan *kitschen* yang berarti secara literal 'memungut sampah dari jalan'. Oleh sebab itu istilah *kitsch* sering ditafsirkan sebagai sampah artistik yang berselera rendah (Piliang,

¹ Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2003 : 194). Tayangan-tayangan sampah tersebut terjadi setidaknya karena dua hal, yaitu ; *pertama*, televisi sebagai industri (institusi ekonomi) memasuki medan kompetisi yang ketat, sehingga sudah tidak lagi sempat berfikir kualitas konten sebuah program. Sebab, memproduksi program yang berkualitas membutuhkan dana yang tidak sedikit dan ritual yang tidak sederhana, seperti survey khalayak. *Kedua*, industri televisi masuk dalam bisnis kreatif yang bergerak dalam dinamika sosial-ekonomi yang cukup tinggi dan tidak terduga. Kedua hal tersebut yang mendorong stasiun televisi menempuh jalan pintas (*short cut*) dalam setiap produksi programnya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa budaya dalam industri televisi berbeda sama sekali dengan budaya pada jalur industri lain.

Kedua, dalam relasinya dengan televisi, dominan masyarakat masih bertindak sebagai penikmat (*viewer*), bukan pengamat (*watcher*) tayangan televisi. Sebagai *viewer*, penonton bersifat pasif, bersikap menerima saja isi tayangan televisi tanpa perspektif kritis. Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan mana yang asli dan palsu dalam televisi. Bahkan, dapat saja masyarakat sudah tidak peduli lagi apakah tayangan televisi tersebut asli atau palsu, fakta atau dusta, ilusi atau fantasi. Sebab, dalam televisi suatu yang semula etis dapat berubah menjadi estetis. Suatu yang porno lebih pornografis dalam televisi. Suatu etis menjadi lebih estetis dalam televisi. Suatu drama kehidupan menjadi sangat dramatis dalam televisi. Demikian juga, sesuatu yang semula bersifat *religious* dapat dikemas menjadi *religioutainment*. Realitas kekerasan menjadi lebih dramatis setelah masuk televisi, sebab seorang demonstran menjadi lebih heroik setelah aksinya diliput oleh kamera televisi.

Media literacy dapat digunakan untuk membongkar relasi kedua hal tersebut. *Media lietracy* merupakan suatu perspektif yang secara aktif digunakan ketika menerima konten media dalam rangka melakukan intepretasi makna pesan (Potter, 2001 : 14). Oleh sebab itu, *media literacy* merupakan kemampuan untuk membawa keahlian berpikir kritis pada semua media, dari video musik, internet hingga penempatan produk dalam film dan display virtual pada papan iklan. *Media literacy* mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada dan memperhatikan apa yang tidak ada. *Media literacy* merupakan insting yang dilatih dan dididik untuk mempertanyakan ada apa dibalik produksi teks media, motif, uang, nilai atau kepemilikan dan menyadari bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi konten media. Oleh sebab itu, terdapat lima pertanyaan

kunci dalam *media literacy*, yaitu ;²

1. Siapa yang membuat pesan dalam media?
2. Teknik apa yang digunakan sehingga membuat khalayak tertarik?
3. Bagaimana orang dapat saling berbeda dalam memahami pesan media?
4. Gaya hidup atau nilai apa yang direpresentasikan dalam pesan tersebut?
5. Mengapa pesan ini disampaikan?

Dengan demikian, *media literacy* sebagai gagasan kritis dalam mengkonsumsi media sesungguhnya hanya memadai untuk menjelaskan isi media. Padahal untuk berfikir kritis, publik perlu memperhatikan perkembangan budaya media. Melalui pemahaman terhadap perkembangan budaya media, publik dapat dengan baik melihat bahwa televisi merupakan mesin pembentuk kebudayaan massa. Sebab tanpa disadari, budaya media saat ini telah merubah peran keluarga dan sekolah (Kellner, 1995 : 16). Namun demikian, berfikir kritis melalui pendekatan *media literacy* saja belum cukup memadai untuk menjelaskan bagaimana teks media bekerja sebagai pencipta kebenaran dan berkuasa menyusun ‘ilmu pengetahuan’ sebagai sesuatu yang normal dalam realitas sosial. Oleh karena itu, pemikiran Foucault tentang kebenaran, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan menjadi relevan untuk diajukan. Tesis Foucault yang paling menarik untuk dikembangkan adalah hubungan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan.

Pusat pemikiran Foucault terletak bukan pada *apa itu kekuasaan*, tetapi *bagaimana kekuasaan itu bekerja dan dijalankan*. Oleh sebab itu, Foucault memaknai kekuasaan bukan sebagai kepemilikan seseorang terhadap sumber-sumber atau aset kekuasaan tertentu yang bersifat material-struktural-institusional, melainkan kedaulatan yang diperoleh melalui penerapan disiplin dan berbagai kohesi sosial. Fokus perhatian Foucault bukan pada kekuasaan politik dalam hirarki pemerintahan atau struktur sosial, tetapi kekuasaan yang bersifat menyebar. Di mana saja ada aturan dan manusia memiliki kohesi antara satu dan lainnya dengan dunia, di tempat itulah kekuasaan bekerja. Perspektif baru inilah yang menghantarkan dialektika kekuasaan dan pengetahuan dalam media massa sebagai *post media literacy*.

2 Lihat <http://www.medialit.org/>

Pokok Pemikiran dan Karya Michel Foucault

Foucault menulis banyak buku lintas disiplin seperti sejarah, psikologi, sosiologi, gender, sastra bahkan ilmu kedokteran. Kendati fokus studinya berbeda-beda, namun satu hal yang mempersatukan dan menarik perhatian Foucault adalah tentang *Kekuasaan dan Pengetahuan* dan bagaimana keduanya bekerja sama. Foucault tertarik pada Pengetahuan akan manusia dan Kekuasaan yang berpengaruh atas manusia. Foucault meragukan manusia memiliki pengetahuan tentang kebenaran mutlak (hakiki atau absolut). Oleh karena itu, menurutnya jika kebenaran mutlak tersebut disingkirkan, maka pengetahuan hanyalah apa yang dikumpulkan dan diputuskan benar oleh sekelompok orang, melalui konvensi sosial-budaya atau lewat kesepakatan ilmiah. Untuk membentuk kebenaran dibutuhkan tenaga sebagai kekuatan. Karena itulah, menurut Foucault, pengetahuan itu adalah kekuasaan yang bersifat memaksa.

Bagaimana pengetahuan dan kekuasaan tersebut bekerja? Menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan bekerja melalui bahasa. Sebab, pada tingkat yang paling mendasar, ketika seorang belajar berbicara, ia menerima pengetahuan dasar dan aturan-aturan kebudayaan pada waktu yang sama. Pada tingkat yang lebih khusus, semua ilmu manusia (psikologi, sosiologi, linguistik bahkan ilmu kedokteran) mendefinisikan manusia sekaligus menggambarkannya dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti rumah sakit, sekolah atau pengadilan. Ingham (2001) mengurai beberapa bentang pemikiran Foucault yang tertuang dalam sejumlah karya tulisnya. Karya tulis Foucault tersebut akan diurai singkat sebagai berikut ;

- ♦ *Kegilaan dan Peradaban*. Tulisan ini berisi tentang Foucault yang mendatangi beberapa klinik dan sejumlah analisis media, untuk mencari tahu tentang kegilaan. Namun justru dari sini Foucault menemukan keraguan. Benarkah kegilaan itu ada? Tidakkah kegilaan itu hanya semesta wacana yang diproduksi oleh para Dokter sebagai penguasa yang memiliki otoritas mendefinisikan kegilaan pada orang gila? Sebenarnya, bagaimana kegilaan harus dipikirkan? Apa yang menyebabkan kegilaan? Apakah kegilaan penyakit jasmani atau rohani? Bagian mana yang dapat disebut kegilaan, tubuh atau jiwa?
- ♦ *Lahirnya Klinik*. Klinik bagi Foucault merupakan realitas yang menyimpan banyak misteri bagi terselenggaranya suatu praktek kekuasaan. Rumah sakit dan kedokteran klinis dinilai Foucault sebagai metode terbaik untuk merawat pasien dan melatih para dokter muda.

Inilah yang disebut Foucault dengan *Klinik*. *Tatapan mata* para dokter pada penyakit aneh pasien akan memiliki kemampuan berbicara. Saat *tatapan mata* tersebut semakin jelas melihat suatu penyakit, maka dia akan berubah menjadi ajaran yang harus diajarkan dan disebarluaskan pada para dokter dan para medis. Tiba-tiba *tatapan mata* menjadi suatu kekuasaan yang dapat melihat bagian terpendek dan tersembunyi dari tubuh pasien.

Demi sebuah ajaran yang harus diajarkan sebagai sebuah pengetahuan, sudah tidak ada lagi yang dapat disembunyikan oleh pasien dari *tatapan mata* para dokter tersebut. Atas nama pengetahuan, membedah mayat bukan lagi hal baru dan tabu. Karena melibatkan mayat, maka gagasan tentang kematian mengalami perubahan. Kematian bukan lagi ketiadaan hidup, tetapi puncak kehidupan atau kematian awal dari sebuah kehidupan baru. Karena—menurut Foucault—pembedahan mayat memberi ilmu kedokteran kesempatan untuk menundukkan seluruh tubuh pada *tatapan mata ilmiah*.

- ♦ *Tatanan Hal Ihwal*. Awalnya Foucault ingin mengetahui apa arti kita semua tahu, bagaimana membentuk kategori pengetahuan dan bagaimana suatu pengetahuan dapat berbeda pada setiap masa. Foucault menilai wacanalalah sumbernya, namun rupanya wacana juga hanya sebatas mempengaruhi wacana yang lain. Wacana merupakan istilah pokok pemikiran Foucault. Menurut artinya yang paling luas, wacana berarti sesuatu yang ditulis atau dikatakan, dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda dan menandai hubungan yang lain dengan Strukturalisme dan fokus dominannya pada penggunaan bahasa. Setiap zaman akan mendefinisikan wacananya masing-masing, dan defenisi tersebut dapat berubah secara radikal setiap waktu.
- ♦ *Disiplin dan Hukuman* . Dalam buku ini, Foucault hendak mengetengahkan relasi kekuasaan yang bergerak melalui wacana berakibat pada rasa sakit pada tubuh manusia. Pengamatannya pada praktek disiplin penjara membuktikan hal itu. Foucault memulai pergerakan wacana dengan menyampaikan kisah sejarah tentang hukuman yang terus bergeser sesuai zamannya. Sistem hukuman yang berpusat pada rasa sakit yang dipertontonkan secara terbuka menjadi tidak terkontrol dan dapat memicu kerusuhan atau huru hara politik. Seluruh sistem hukuman yang berpusat pada rasa sakit dirancang dan dijalankan lantas direduksi menjadi satu hukuman untuk semua

jenis kejahatan ; hukuman penjara. Masyarakat sudah terbiasa dengan wacana ini dan sulit untuk kembali pada wacana hukuman mati yang dipertontonkan secara terbuka sebelumnya.

- ♦ *Sejarah Seksualitas*. Dalam buku yang tidak selesai ditulis ini, Foucault mengidentifikasi suatu pandangan konvensional tentang seksualitas, yaitu perbincangan tentang seksualitas secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu, menurut Foucault, kita perlu berbicara tentang seks secara terbuka. Ini adalah salah satu jalan untuk menyembuhkan penyakit seksualitas. Apa yang hendak dikemukakan Foucault bahwa wacana tentang seks menjadi perbincangan luas. Seks menjadi studi ilmiah dan menjadi objek pengaturan yang seksama oleh beberapa lembaga seperti sekolah atau rumah sakit. Bagi Foucault wacana tentang seksualitas merupakan bagian dari langkah Barat untuk menghasilkan kebenaran seks melalui proses pendefinisian seksualitas berdasarkan budaya mereka. Kendati wacana seksualitas mulai banyak diperbincangkan orang, namun Foucault menilai wacana ilmiah tentang seksualitas manusia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang.

Dari sinilah Foucault mulai memberi pembatasan atau definisi tentang kekuasaan sebagai inti dari pokok pikirannya. Menurut Foucault, kekuasaan adalah aneka ragam hubungan kekuatan yang ada di dalam ruang lingkup tempat hubungan itu berjalan yang mewujudkan organisasinya sendiri. Dalam pengertian tradisional, kekuasaan itu bersifat monolitik, hirarkis dan dapat dilihat dengan jelas. Kekuasaan dapat terwujud dalam Undang-undang yang dituliskan. Hal tersebut menggambarkan dengan baik praktek kekuasaan dalam sistem monarki tradisional.

Namun saat ini, praktek kekuasaan sudah berkembang dalam metode-metode baru. Metode baru kekuasaan tidak dijamin oleh hak, tetapi oleh teknik. Kekuasaan tidak dijamin oleh Undang-undang, tetapi melalui proses normalisasi. Kekuasaan tidak ditegakkan oleh hukuman tetapi oleh sistem kontrol. Metode yang digunakan untuk menunjukkan kekuasaan pada semua tingkat, melampaui negara dan aparatnya. Dalam hal ini Foucault memberi contoh stigma antara normal dan sakit, benar dan salah atau baik dan dosa merupakan bentuk lain praktek kekuasaan. Bentuk baru kekuasaan ini jauh lebih halus daripada kekuasaan dalam pengertian tradisional. Oleh karena itu, menjadi jauh lebih mudah mengabaikannya tetapi justru lebih sukar melawannya.

Foucault hanya menegaskan bahwa *tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan tanpa serangkaian tujuan dan sasaran*. Foucault sama sekali tidak memberi jalan keluar kepada kita bagaimana melepaskan diri dari kekuasaan tersebut. Alasannya, karena kekuasaan berjalan melalui proses normalisasi, maka tidak ada lagi orang yang mengurus kekuasaan, oleh karena itu tidak ada orang yang dapat dipersalahkan. Dalam kondisi 'normal' seperti itu, apakah ada cara untuk melawan? Dalam pandangan skeptis demikian, Foucault memberi contoh kehidupan pasien di sel rumah sakit atau narapidana di sel penjara yang tidak mampu melawan karena kontrol dari otoritas pemegang kekuasaan, seperti dokter rumah sakit dan sipir penjara yang demikian ketat.

Sampai disini, apa sebenarnya pokok gagasan yang hendak disampaikan Foucault? Disinilah kita akan sampai pada kekuatan wacana melalui bahasa sebagai mesin pembentuk makna. Menurut Foucault, wacana memiliki kemampuan menciptakan pengetahuan manusia. Foucault memfokuskan seluruh karyanya pada mekanisme sentral ilmu-ilmu sosial pada penggolongan orang yang *normal* dan *abnormal*. Kita sesungguhnya mendefinisikan yang normal melalui yang abnormal. Hanya melalui abnormalitas kita mengetahui yang normal. Maka dari itu, meskipun abnormalitas disingkirkan atau disembunyikan, orang-orang yang normal selalu mempelajari dan mempertanyakannya. Saat Foucault sedang berbicara tentang sejarah kegilaan, sesungguhnya kita tidak akan pernah sampai pada 'makna kegilaan' yang sebenarnya, yaitu kegilaan yang absolut dan mutlak. Sejarah kegilaan yang kita peroleh merupakan wacana atau pendapat orang-orang yang berbicara tentang kegilaan, tetapi bukan kegilaan itu sendiri. Kita mengetahui kegilaan (abnormal) karena kita menghadapkannya pada suatu yang normal. Padahal, sesuatu yang normal itu hanya merupakan mayoritas kesepakatan bersama melalui proses normalisasi.

Kebenaran Media dalam Perspektif Foucauldian

Sedikit dari para pemain televisi yang menyadari bahwa industri televisi saat ini telah terperangkap, misalnya menjadi agen kekerasan atau agen pornografi yang semuanya bekerja secara subtil dalam bentang layar virtual. Tubuh sosial kita baru menyadari saat perilaku kekerasan meningkat tajam dalam berbagai sektor dan praktek pornografi menyebar luas bagai virus tanpa *anti body* untuk dapat mencegahnya. Pada gilirannya, kekerasan dan pornografi dapat saja menjadi konvensi sosial yang diterima secara permisif

dan massif sebagai sebuah realitas kebenaran baru yang normal. Dia dapat bersemayam dengan kokoh dan mapan dalam tubuh sosial, melalaui berbagai praktek disiplin yang diadaptasi oleh media. Tayangan televisi menjadi tidak menarik tanpa muatan kekerasan dan pornografi, karena masyarakat terlebih dahulu sudah kecanduan dengan kekerasan dan pornografi. Melalui disiplin menonton, kekerasan dan pornografi menjadi prilaku normal. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka inilah lonceng pertanda kidung kematian harus segera dinyanyikan untuk mengiringi jenazah matinya eksistensi humanisme dan spiritualitas religius yang telah meninggalkan kita semua menuju tempat peristirahatannya yang terakhir.

Dalam dua konteks yang disebutkan pada pendahuluan tersebut hendak diketengahkan pemikiran Foucault tentang kuasa media sebagai pembentuk wacana kebenaran baru atau meneguhkan wacana kebenaran lama. Oleh karena itu, dalam perspektif Foucauldian, kita tidak akan pernah sampai pada 'esensi kebenaran' sebab kita hanya berputar-putar pada 'eksistensi kebenaran'. Dalam hal ini, kuasa media menjadi pedang bermata dua, satu sisi dapat dijadikan alat pembentuk kebenaran baru, seperti konten kekerasan dan pornografi sebagai prilaku normal dalam media yang disebutkan sebelumnya. Namun pada sisi lain, media juga dapat bertindak sebagai alat perlawanan untuk menolak kebenaran lama yang dominan.

Kasus pencalonan Julia Perez dan Maria Eva sebagai calon Kepala Daerah oleh sejumlah partai politik yang dimediasi melalui media (terutama televisi) dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan media terhadap adanya pandangan tentang 'kebenaran' politisi atau birokrat karir lebih baik menjadi pejabat publik seperti Kepala Daerah (sebagai kebenaran lama yang dominan) dari pada artis atau selebritis (sebagai kebenaran baru yang melakukan perlawanan). Perlawanan media tersebut bersifat subtil melalui kerja simbolisme atau praktek semiotis. Namun pesannya sangat jelas, di tengah banyaknya politisi dan birokrat sebagai pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi, artis dan selebritis merupakan alternatif kebenaran baru dalam realitas politik kontemporer yang pantas untuk diketengahkan. Ini disebabkan belum pernah tercatat dalam sejarah politik tanah air, artis melakukan tindak pidana korupsi. Kebenaran normatif politik menjadi jungkir balik, memilih Kepala Daerah dari unsur politisi atau birokrasi yang korup atau selebriti atau artis yang tidak korup?

Tulisan Foucault *The Birth of Prison* dapat dikemukakan sebagai contoh pergeseran norma perilaku sosial tersebut. Perbedaan hukuman

pada abad 18 dan 19, semula dari hukuman yang dipertontonkan kepada publik menjadi hukuman tubuh yang penuh disiplin dalam penjara. Studi Foucault tersebut berkisar pada analisis wacana yang memiliki fungsi untuk melakukan pengungkapan terhadap aturan-aturan dan struktur wacana. Inilah yang disebut Foucault dengan *archaeology*. *Archaeology* mengungkap berbagai aturan-aturan wacana dengan melewati deskripsi yang seksama yang melibatkan banyak sektor kehidupan secara diskursif. Sebuah *archeology* Foucault menjadi relevan dihadirkan kembali untuk mencermati produksi wacana terutama oleh media massa saat ini. Media massa bekerja menggunakan bahasa atau gambar sebagai sebuah tanda yang memuat makna. Dalam bukunya Foucault menyatakan bahwa *language as a discourse is never neutral and is always laden with rules, privileging a particular group while excluding other* (Foucault, 1972 : 216). Pada bagian lain, Foucault secara spesifik menyatakan bahwa *discourse is political commodity, a phenomenon of exclusion, limitation, prohibition* (dalam Gordon, 1980 : 245). Pandangan Foucault tersebut dapat dilihat gambarannya dalam berbagai pemberitaan media massa di tanah air.

Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dalam pemberitaan media massa tanah air terhadap konflik bersenjata di Aceh. Pada masa pemerintahan Orde Baru—yang sering disematkan sebagai penguasa wacana—istilah yang digunakan adalah Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK) untuk menunjuk sebuah gerakan yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa Aceh berlaku sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pada masa berikutnya—seiring beralihnya kekuasaan—istilah GPK berubah menjadi GAM. Penggunaan istilah GAM merupakan ‘kemenangan’ perebutan wacana dominan saat itu, pada masa transisi politik tahun 1998. Selanjutnya, pada masa berlakunya Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, istilah GAM sebagai wacana berubah menjadi Gerakan Sparatis Pemberontak (GSP). Saat ini, pasca perjanjian damai Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM, seluruh istilah GPK, GAM dan GSP menjadi pembicaraan atau bahasa yang dihindari untuk digunakan sebagai wacana. Hal tersebut terlihat jelas dalam seluruh pemberitaan perburuan teroris di Aceh pada sejumlah media massa beberapa waktu lalu.

Dalam konteks kontemporer pada pesatnya industri media massa saat ini, kendati pemaknaan terhadap teks media tidak dapat dihindarkan oleh seorang analis, namun seorang analis yang menganalisis wacana terhadap teks media seharusnya meminimalisir proses pemaknaan tersebut. Sebab,

pemaknaan teks media melalui interpretasi akan menutup peluang hadirnya struktur diskursif. Wacana pada teks media cukup dimengerti sebagai bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan praktek kekuasaan dari sudut pandang tertentu. Oleh sebab itu, dalam memahami wacana pada media, tidak bisa lepas dari konsep ideologi karena setiap makna dari wacana selalu bersifat ideologis (Fairclough dalam Burton, 2000 : 31).

Foucault benar-benar meyakini bahwa siapapun yang berkuasa memiliki kemampuan untuk menciptakan wacana dominan melalui praktek-praktek diskursif serta wujud-wujud kekuasaan sebagai sebuah kebenaran. *The Theory of Truth* merupakan pemikiran cemerlang Foucault untuk menggambarkan eksplorasi praktek diskursif penguasa dalam membentuk kebenaran. Gagasan Foucault tentang wacana dan kekuasaan merupakan jawaban bagi pertanyaan mengapa dan bagaimana formasi diskursif tersebut dapat berubah. Foucault memberi contoh bagaimana dokter dengan kekuasaan yang dimilikinya mampu mengukuhkan pasien yang menderita kegilaan harus dirawat pada sebuah klinik sebagai refleksi praktek diskursus yang nyata dari pihak yang berkuasa tersebut. Dengan demikian, suatu 'kebenaran' pada dasarnya dapat dibentuk dan dikondisikan oleh siapapun sebagai *man of desire*. Dalam konteks inilah sesungguhnya media dapat diletakkan sebagai *man of desire* yang memiliki kekuasaan memproduksi kebenaran melalui wacana yang disajikannya. Atau, media juga dapat diletakkan sebagai medan pertarungan bagi perebutan wacana dari pihak-pihak yang sedang berperang memproduksi kebenaran.

Menurut Foucault dalam bukunya *Power/Knowledge* yang diedit oleh Gordon (1980 : 133), nilai-nilai tertinggi atau kebenaran berasal dari episteme, yaitu keseluruhan pola berpikir dengan sistem wacana yang digunakan. Jadi, kebenaran terjalin secara intrinsik dalam relasi antara wacana yang digunakan manusia untuk mengungkapkan kebenaran itu, sistem kekuasaan yang berlaku, dan kedudukan subjek-subjek yang terlibat. Setelah melalui dialog episteme, selanjutnya multi-episteme tersebut akan menyusun *panopticism*, yaitu 'menara pengawas' yang seolah-olah secara kontinu memonitor segala gerakan orang. Istilah *panopticism* diberikan Foucault untuk mendisiplinkan tubuh para narapidana yang dipenjara. Foucault mengartikan sebagai formula umum dominasi (lihat Smart, 1983 : 109). Tatanan sosial disipliner (*diciplanary social order*) dan strukturasi masyarakat yang didasarkan pada pendisiplinan merupakan *out line* penting dalam sejarah pemikiran Foucault.

Dalam konteks perkembangan media massa mutakhir, *panopticism* dapat saja berupa kontrol wacana oleh penguasa melalui media untuk mengukuhkan kebenaran atau kelanggengan suatu kekuasaan, bahkan suatu 'kebenaran'. Mekanisme kontrol melalui *panopticism* dan pembentukan individu yang patuh dan berdisiplin adalah wujud kekuasaan yang ada di mana-mana (*omniprésent*). Di sini, kekuasaan tidak lagi menjadi sederhana seperti halnya gagasan hegemoni dan dominasi Gramsci (lihat dalam Patria dan Arief, 2003). Sebab, kekuasaan beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan dalam wacana tertentu.

Kekuasaan Media dalam Perspektif Foucauldian

Sejumlah tulisan Foucault memang memberikan perhatian kritis pada praktek kekuasaan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang *inheren* dalam realitas sosial yang penuh dengan berbagai formasi diskursif. Kekuasaan di sini bukan berarti properti penguasa atau institusi. Episteme kekuasaan diekspresikan melalui bahasa (atau melalui gambar dalam industri visual). Bahasa dan gambar akan menjamin kelanggengan suatu kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Ketertarikan Foucault bukan pada apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi dalam bidang tertentu. Tepatnya, Foucault hendak menganalisis strategi kuasa yang bersifat faktual.

Foucault memberi perhatian kuasa pada relasi antara kuasa (*power*) dengan pengetahuan (*knowledge*). Bagi Foucault, kekuasaan yang memproduksi pengetahuan (*power produce knowledge*). Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan secara langsung dapat dijelaskan sebagai representasi dari hubungan '*power-knowledge*'. Lebih lanjut dalam pandangan Foucault tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Dengan demikian, tidak ada pengetahuan yang netral dan murni, karena di dalamnya ada kuasa. Gagasan Foucault tentang kuasa dapat dipahami dalam beberapa pendapat, antara lain (lihat dalam Bertens, 1997 : 48-56) :

Pertama, *kuasa bukanlah kepemilikan, tetapi strategi*. Kuasa bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, digunakan, dibagi atau disebarluaskan. Kuasa dalam pandangan Foucault tidak dapat dimiliki, tetapi langsung dipraktikkan dalam suatu setting sosial tertentu yang melibatkan banyak posisi strategis dan berelasi satu sama lainnya, sehingga selalu mengalami pergeseran.

Kedua, *kuasa ada di mana-mana*. Ini merupakan terma lanjut dari pandangan Foucault sebelumnya. Dalam pandangan ini, kuasa tidak dapat diidentifikasi milik perseorangan (aparatus negara) atau institusi (lembaga negara). Bagi Foucault, di mana saja selalu ada struktur dan aturan serta relasi yang khas antar manusia. Kondisi tersebut terhubung dengan dunia luar dan di situlah kuasa membuka prakteknya. Tentu saja setiap struktur masyarakat mengenal dan mengakui secara kokoh suatu yang dipandang benar. Pada konteks tersebutlah kuasa bekerja menentukan yang benar dan tidak benar untuk selanjutnya disebarluaskan.

Ketiga, *kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi*. Pendapat Foucault ini menegaskan bahwa tidak selamanya kuasa bekerja melalui praktek penindasan dan represif. Oleh sebab itu, kuasa bukanlah milik raja, pemerintah atau laki-laki yang dapat membatasi, melarang atau berbuat sekehendaknya. Melalui normalisasi dan regulasi, kuasa dapat memproduksi realitas dan berbagai ritus kebenaran.

Keempat, *kuasa bersifat produktif*. Pendapat ini merupakan penolakan Foucault terhadap adanya pandangan yang menyatakan kuasa itu bersifat menindas karena itu harus di tolak. Penolakan kuasa dalam pandangan tersebut justru merupakan bagian strategi mengukuhkan suatu kuasa, sebagaimana disebutkan pada pengertian pertama tentang kuasa. Karena kuasa ada di mana-mana, menjadi milik siapa saja dan bekerja melalui proses normalisasi dan regulasi, maka suatu kuasa bersifat produktif.

Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan ibarat dua sisi dari satu mata uang. Kekuasaan dapat diartikulasikan melalui pengetahuan, namun pengetahuan selalu memiliki efek terhadap kekuasaan. Karena itulah, untuk memahami kekuasaan, diperlukan analisis wacana tertentu, karena pada gilirannya suatu wacana mampu menghasilkan kebenaran. Kebenaran tidak jatuh dari langit atau seketika keluar dari perut bumi, tetapi hadir karena diproduksi. Setiap kekuasaan memiliki tendensi memproduksi kebenaran melalui penyebaran wacana. Diskursus Foucauldian selanjutnya akan mengetengahkan betapa pentingnya sebuah wacana dalam menyusun pengetahuan bahkan memproduksi suatu kebenaran.

Penutup

Tulisan ini sesungguhnya hendak menggagas pentingnya pemikiran Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan dalam konteks pesatnya industri media massa tanah air. Praktek ideologis media massa pada

gilirannya akan menempatkan media sebagai kekuatan mekanik membentuk ‘kebenaran’ melalui praktek diskursif. Oleh karena itu berbagai studi tentang politik atau media yang melibatkan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai perspektif teori postmodernisme. Sebagai seorang pemikir dari tradisi filsafat postmodernisme, Foucault hendak menggagas bahwa kebenaran merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan berdasarkan ‘menara pemancar’ (*panopticism*). Pertukaran di sini bukan dalam pengertian ekonomi tetapi dalam pengertian bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan lingkaran yang terdiri dari berbagai seduksi.

Kekuasaan adalah suatu nama yang diberikan orang untuk suatu kompleks situasi yang strategis di dalam sebuah masyarakat. Dalam pengertian ini suatu relitas adalah efek dari diskursus tertentu. Dengan demikian, kekuasaan dipahami dengan cukup lebih memadai dalam konteks diskursus ‘pemerintah’, *on governmentality* (Philpott, 2000 : 150). Akibatnya, negara dan media atau siapa saja yang memiliki ‘kekuasaan’ tidak bisa lagi dipahami sebagai domain yang otonom. Pada titik ini—sebagai suatu pendekatan mutakhir dalam studi media—*cultural studies* dapat digunakan untuk memberikan evaluasi moral atas masyarakat modern, terutama memberi refleksi kritis terhadap kinerja media massa. Berbagai teori yang lahir dari tradisi pemikiran filsafat postmodernisme (seperti Dekonstruksi Derrida atau Simulasi Baudrillard) tentu dapat digunakan untuk membongkar berbagai relasi kekuasaan yang bermain dan bersembunyi di balik teks media massa.

Daftar Pustaka

Buku

- Bertens, K. (1996). *Filsafat Barat Abad XX : Prancis*. Jakarta : Gramedia.
- Burton, B. (2000). *Talking Television : An Introduction to the Study of Television*. London: Arnold.
- Foucault, Michel (1972). *The Archeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New York : **The Pantheon Books**.
- Gordon, Colin [Ed] (1980). Michel Foucault ; *Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York : The Pantheon Books.
- Ingham, Lydia Alix Fill (2001). *Foucault untuk Pemula*. Yogyakarta

:Kanisius.

- Kellner, Douglas, (1995). *Media Culture, Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern*, London and New York : Routledge.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi (2003). *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Philpott, Simon (2000). *Rethinking Indonesia : Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*. London : MacMillan Press.
- Piliang, Yasraf Amir (2003). *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Potter, W. James (2001). *Media Literacy*. London and New Delhi : Sage Publications.
- Smart, Bary (1983). *Foucault, Marxism and Critique*. London : Routledge.

Internet

<http://www.medialit.org/> diakses, Minggu, 25 April 2010